IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM KESEHATAN DAN PENDIDIKAN GRATIS DI KABUPATEN HALMAHERA SELATAN TAHUN 2008-2014

Muhammad Agus Umar

*Universitas Bumi Hijrah Maluku Utara Jln. Raya Soififi, Kota Tidore Kepulauan Provinsi Maluku Utara
Email : muhagus197@gmail.com*

Abstrak: Sistem desentralisasi saat ini yang pelaksanaannya diwujudkan dengan pemberian kewenangan kepada daerah-daerah bertujuan memungkinkan daerah untuk menghasilkan sebuah kebijakan yang meningkatkan daya guna penyelenggaraan pemerintah dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji sejauh mana implementasi kebijakan program kesehatan dan pendidikan gratis oleh pemerintah daerah Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara pada tahun 2008-2014. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survei dengan teknik *random sampling*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi pelaksanaan kebijakan program kesehatan dan pendidikan gratis oleh pemerintah daerah Kabupaten Halmahera Selatan dalam kurun waktu tahun 2008-2014 sudah tepat sasaran dan sangat bermanfaat bagi masyarakat. Meskipun dari segi pembiayaan menurut para pelaksana program di tingkat bawah belum dapat memenuhi item-item pendukung operasional program kegiatan, tetapi kebijakan ini merupakan sebuah terobosan pemerintah daerah sebagai bentuk pelayanan terhadap hak-hak dasar masyarakat.

Kata Kunci : *implementasi, kebijakan, program kesehatan dan pendidikan gratis.*

PENDAHULUAN

Pelaksanaan otonomi daerah (desentralisasi) di Indonesia telah ditekankan pada pemberian kewenangan yang luas terhadap pemerintahan daerah agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Desentralisasi pemerintahan yang pelaksanaannya diwujudkan dengan pemberian otonomi kepada daerah-daerah bertujuan untuk memungkinkan daerah agar dapat menghasilkan kebijakan-kebijakan yang meningkatkan daya guna penyelenggaraan pemerintah dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat sebagai warga negara.

Syaukani (2002) menyatakan bahwa kebijaksanaan tentang otonomi daerah, memberikan otonomi yang sangat luas kepada daerah, khususnya kabupaten dan kota.

Otonomi daerah dilaksanakan dalam rangka mengembalikan harkat dan martabat masyarakat di daerah, memberikan peluang pendidikan politik dalam rangka peningkatan kualitas demokrasi di daerah, peningkatan efisiensi pelayanan publik di daerah, peningkatan percepatan pembangunan di daerah, dan pada akhirnya diharapkan pula penciptaan cara berpemerintahan yang baik (*good governance*).

Mahfud MD (2000) mengemukakan implikasi dari adanya kewenangan urusan pemerintahan yang begitu luas yang diberikan kepada daerah dalam rangka otonomi daerah, dapat merupakan berkah bagi daerah, namun pada sisi lain bertambahnya kewenangan daerah tersebut sekaligus juga merupakan beban yang menuntut kesiapan daerah untuk melaksanakannya, karena semakin

bertambahnya urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.

Kebijakan publik menurut Freadrich (1969) adalah serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan yang harus dipersiapkan, yaitu: Sumber Daya Manusia, Sumber Daya Keuangan, sarana dan prasarana. Hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kemungkinan (kesempatan-kesempatan) dimana kebijakan tersebut diusulkan agar berguna dalam mengatasinya untuk mencapai tujuan yang dimaksud.

Birokrasi publik, pada dasarnya dihadirkan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Meskipun birokrasi publik memiliki ciri-ciri yang berbeda dengan organisasi bisnis, tetapi dalam menjalankan misi, tujuan dan programnya menganut prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, dan menempatkan masyarakat sebagai *stakeholder* yang harus dilayani secara optimal. Layanan publik, merupakan hak masyarakat yang pada dasarnya mengandung prinsip: kesederhanaan, kejelasan, kepastian waktu, akurasi, keamanan, tanggung-jawab, kelengkapan sarana, dan prasarana, kemudahan akses, kedisiplinan, kesopanan keramahan, dan kenyamanan.

Udoji (1981) menyatakan bahwa hasil akhir implementasi kebijakan dapat terwujud dalam beberapa indikator yakni hasil atau output yang biasanya terwujud dalam bentuk konkret, keluaran atau outcome yang dapat berwujud seperti tercapainya pengertian masyarakat atau lembaga, manfaat atau benefit

yang wujudnya beragam; dampak atau impact baik yang diinginkan maupun yang tak diinginkan serta kelompok target baik individu maupun kelompok.

Adanya desentralisasi juga telah mendorong pemerintah daerah saat ini berupaya memberikan pelayanan publik secara maksimal kepada hak-hak dasar masyarakat terutama hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik dan hak untuk pelayanan pendidikan melalui berbagai kebijakan dan program prioritasnya.

Birokrasi publik, pada dasarnya dihadirkan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Meskipun birokrasi publik memiliki ciri-ciri yang berbeda dengan organisasi bisnis, tetapi dalam menjalankan misi, tujuan dan programnya menganut prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, dan menempatkan masyarakat sebagai *stakeholder* yang harus dilayani secara optimal. Layanan publik, merupakan hak masyarakat yang pada dasarnya mengan-dung prinsip: kesederhanaan, kejelasan, kepastian waktu, akurasi, keamanan, tanggung-jawab, kelengkapan sarana, dan prasarana, kemudahan akses, kedisiplinan, kesopanan keramahan, dan kenyamanan

Tangkilisan, (2005) menyebutkan bahwa birokrasi publik tidak berorientasi langsung pada tujuan akumulasi keuntungan, namun memberikan layanan publik dan menjadi katalisator dalam penyelenggaraan pembangunan maupun penyelenggaraan tugas negara. Orientasi pada pelayanan menunjuk pada seberapa banyak energi birokrasi

dimanfaatkan untuk penyelenggaraan pelayanan publik.

Kabupaten Halmahera Selatan sebagai salah satu daerah otonomi baru di Provinsi Maluku Utara sejak dimekarkan pada tahun 2003 terus berupaya melakukan pembenahan dalam rangka pelayanan publik ke arah yang lebih baik. Sejalan dengan hal itu, maka pemerintah daerah melalui Peraturan Daerah No 06 tahun 2007 tentang sistem Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA) yang merupakan satu bentuk kebijakan yang dirumuskan dengan tujuan: 1) pembentukan suatu mutu pelayanan kesehatan yang berpegang kepada masyarakat, 2) penyediaan sarana dan prasarana kesehatan yang memadai, 3) penyediaan Sumber Daya Manusia khususnya tenaga medis, serta 4) kemudahan masyarakat untuk memperoleh pelayanan kesehatan, dilihat dari besar biaya yang di sanggupi masyarakat untuk memperoleh suatu pelayanan kesehatan.

Selain di bidang kesehatan, pemerintah daerah Kabupaten Halmahera Selatan juga mengeluarkan sebuah kebijakan untuk pelayanan kebutuhan dasar masyarakat di bidang pendidikan melalui nota kesepakatan pemerintah daerah nomor : 420/2273/2012 dan dilengkapi dengan Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Halmahera Selatan tentang implementasi penyelenggaraan pendidikan bebas pungutan pada jenjang Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA) di Kabupaten Halmahera Selatan.

Kebijakan pemerintah melalui program pelayanan masyarakat di bidang pendidikan dan kesehatan ini kemudian berkembang di masyarakat dengan istilah program pendidikan dan kesehatan gratis.

Berbagai kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah khususnya pemerintah daerah tentu saja harus disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan masyarakat daerah setempat. Hal ini akan sangat berpengaruh pada tingkat keberhasilan dari program yang digulirkan. Jumlah masyarakat yang terlayani serta kualitas pelayanan yang diberikan pemerintah merupakan kunci dari keberhasilan sebuah program.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, metode penelitian yang digunakan adalah metode survei, yaitu suatu penelitian yang mengambil sampel dari populasi penduduk dan menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpul data. Penelitian survei dapat digunakan untuk maksud penjajagan (eksploratif), deskriptif, penjelasan, yakni untuk menjelaskan hubungan kausal dan pengujian hipotesa, evaluasi, prediksi, atau meramalkan kejadian tertentu pada masa yang akan datang, penelitian operasional dan pengembangan indikator-indikator sosial.

Penelitian lebih difokuskan pada penelitian lapangan (*field research*) yang dimaksudkan untuk mengetahui permasalahan serta mendapatkan informasi data yang ada di lokasi penelitian. Penggunaan kuesioner dimaksudkan untuk memperoleh informasi dari

masyarakat tentang pelaksanaan program pendidikan dan kesehatan gratis yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Selatan selama kurun waktu dari tahun 2008 sampai tahun 2014. Penelusuran literatur dan data sekunder juga dilakukan guna memperkuat data dan informasi yang disajikan pada bagian pembahasan dalam penelitian ini.

Penelitian dilakukan dengan melibatkan 250 orang responden yang terdiri dari 50 orang pelaksana program pendidikan gratis, 50 orang responden adalah pelaksana program kesehatan gratis serta 100 orang responden adalah penerima program yang dipilih dengan teknik *random sampling*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan Gratis

Perlu dipahami bahwa implementasi kebijakan merupakan tahapan yang sangat penting dalam keseluruhan struktur kebijakan, karena melalui prosedur ini proses kebijakan secara keseluruhan dapat dipengaruhi tingkat keberhasilan atau tidaknya pencapaian tujuan.

Program Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA) merupakan satu dari beberapa kebijakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Selatan dalam menunjang program pelayanan kesehatan bagi masyarakat Kabupaten Halmahera Selatan. Program ini tertuang dalam Peraturan Daerah No. 6 tahun 2007 tentang Jaminan Kesehatan

Daerah (Jamkesda) Kabupaten Halmahera Selatan.

Program ini merupakan bagian dari program kesehatan gratis yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah Kabupaten Halmahera Selatan dan merupakan program andalan pemerintah daerah dalam menangani masalah kesehatan masyarakat di Kabupaten Halmahera Selatan.

Implementasi program kesehatan gratis ini yaitu melalui pembiayaan pada beberapa jenis pelayanan kesehatan terhadap masyarakat seperti : pelayanan dasar, pelayanan kesehatan ibu dan anak, rujukan, imunisasi dan gizi. Jenis-jenis pelayanan ini dianggap merupakan jenis pelayanan yang sangat mendasar dan dibutuhkan oleh warga masyarakat khususnya yang berasal dari kalangan kurang mampu.

Adapun jumlah dari peserta Jamkesda dari tahun 2010 sampai 2011 berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Selatan yaitu pada tahun 2010 jumlah peserta Jamkesda yaitu 95.496 jiwa dengan jumlah penduduk pada tahun 2010 yaitu 141.591 jiwa. Sedangkan pada tahun 2011 peserta Jamkesda menurun menjadi 51.934 peserta.

Tabel.1. Jumlah Peserta Jamkesda yang Berobat ke Pusat Kesehatan Masyarakat (PKM)

Jumlah Peserta Jamkesda yang Berobat ke PKM	Tahun				
	2010	2011	2012	2013	2014
Jumlah Penduduk (jiwa)	141.596	188.911	206.873	211.682	215.791
Peserta Jamkesda yang Berobat ke PKM (orang)	95.496	51.934	45.934	56.011	22.328

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Halmahera Selatan, 2016

Pelayanan pada hakikatnya adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan tujuan memberikan yang terbaik untuk masyarakat, karena itu ia merupakan proses untuk menuju tujuan tersebut dalam proses pelayanan secara rutin dan berkesinambungan dalam masyarakat. Pelayanan kesehatan gratis melalui Sistem Jaminan Kesehatan Daerah memulai proses perubahan dalam pelayanan kesehatan terhadap masyarakat.

Tabel 2.Cakupan Jenis dan Pelayanan Jamkesda

No.	Jenis Pelayanan Jamkesda	Tahun				
		2010	2011	2012	2013	2014
1	Pelayanan Dasar	95.496	51.934	45.934	5.611	22.328
2	Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	5.539	3.666	5.660	5.091	1.686
4	Rujukan	3.065	1.005	2.912	1.901	71
5	Imunisasi	18.175	10.391	13.336	9.850	2.683
6	Gizi	64.008	47.727	56.686	47.135	17.607
Jumlah		186.283	118.602	124.528	69.588	44.375

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Halmahera Selatan, 2016

Selain program kesehatan gratis, pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan juga merumuskan kebijakan di bidang pendidikan. Kebijakan didasarkan pada nota kesepakatan pemerintah daerah nomor : 420/2273/2012 tentang implementasi penyelenggaraan pendidikan bebas pungutan pada jenjang Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA) di Kabupaten Halmahera Selatan yang kemudian diperkuat lagi dengan Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Halmahera Selatan.

Implementasi kebijakan pemerintah daerah melalui program pendidikan gratis ini menekankan kewajiban pemerintah daerah tentang pelayanan pendidikan kepada masyarakat bahwa pemerintah daerah berkewajiban untuk menganggarkan biaya pendidikan pada Sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah dan berkewajiban untuk tidak melakukan pungutan, tanggungan wajib, iuran atau pungutan lain dalam bentuk apapun yang bersifat mengikat, memaksa dan memberatkan peserta didik dan orang tua, larangan pungutan atau yang wajib digratiskan pemerintah.

Adapun tujuan dari penyelenggaraan program ini adalah semata-mata untuk membantu mendorong angka partisipasi sekolah di Kabupaten Halmahera Selatan.

Dengan kata lain, komponen biaya untuk memenuhi kebijakan ‘pendidikan gratis’ adalah berupa subsidi, yaitu jika besaran dana bantuan yang diberikan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi lebih kecil dari biaya

operasional sekolah, maka pemerintah Kota/Kabupaten dan siswa harus menutupi kekurangan dana tersebut. Begitu juga, bila dana yang diberikan jumlahnya sama atau lebih besar, maka orang tua siswa dibebaskan dari iuran pendidikan. Itu berarti bahwa sumber pembiayaan dari kebijakan ‘pendidikan gratis’ di Kabupaten Halmahera Selatan ini dapat berasal dari pemerintah.

Tabel. 3. Angka Partisipasi Sekolah di Kabupaten Halmahera Selatan

Usia	Tahun						
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
7-12	96,22	94,48	96,86	96,86	98,58	96,14	98,65
13 - 15	86,17	82,32	83,73	83,73	87,96	88,01	89,77
16 - 18	47,18	51,78	52,09	52,09	63,46	55,55	63,77

Sumber : Halmahera Selatan Dalam Angka, 2016

Data pada tabel 3 menunjukkan bahwa persentase angka partisipasi sekolah di Kabupten Halmahera Selatan tergolong tinggi pada tingkat Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) sedangkan pada jenjang Sekolah Menengah Atas masih tergolong sedang namun cenderung mengalami peeningkatan. Adanya kebijakan pendidikan gratis ini terbukti telah mendorong angka partisipasi masyarakat untuk mau bersekolah.

A. Persepsi Masyarakat Tentang Pelaksanaan Program Kesehatan dan Pendidikan Gratis

Keberhasilan pelaksanaan sebuah kebijakan oleh pemerintah tergantung pada bagaimana kebijakan tersebut memberikan manfaat bagi warga masyarakat. Berbagai reaksi dan tanggapan akan muncul jika masyarakat sebagai penerima kebijakan merasakan manfaatnya.

Tabel. 4. Respon Masyarakat terhadap Program

Program	Pengetahuan	
	Tahu	Tidak Tahu
Kesehatan Gratis	93 %	7 %
Pendidikan Gratis	91 %	1 %

Sumber : Data primer, 2017

Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana yang terdapat pada Tabel. 4 bahwa pelaksanaan kebijakan program kesehatan dan pendidikan gratis yang dicanangkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Halmahera Selatan tahun 2008 sampai 2014 sudah tersosialisasi dengan baik. Hal ini bisa terlihat pada tingginya persentase masyarakat yang menjawab bahwa mereka sudah mengetahui adanya program ini. Dari 250 respondent yang diteliti 93 % respondent menjawab tahu tentang adanya program kesehatan gratis sedangkan 7 % menjawab tidak tahu. Begitu juga dengan tingkat pengetahuan masyarakat untuk program pendidikan gratis.

Tingginya persentase masyarakat yang mengetahui adanya kebijakn pemerintah daerah melalui program kesehatan dan pendidikan gratis menandakan bahwa sosialisasi yang dilakukan oleh dinas terkait sudah sedemikian maksimal. Selain itu berdasarkan informasi yang diperoleh peneliti di lapangan bahwa program ini sudah sering di sampaikan pada waktu kampanye pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Halmahera Selatan. Dari fakta yang ada di lapangan dapat memberikan gambaran bahwa sosialisasi sangat berperan terhadap sukses tidaknya implemantasi dari sebuah kebijakan.

Tabel. 5. Respon Masyarakat terhadap Pembiayaan Program

Program	Biaya Lain/Pungutan	
	Tidak Ada	Ada
Kesehatan Gratis	82 %	18 %
Pendidikan Gratis	91 %	9 %

Sumber : Data primer, 2017

Dari sektor pembiayaan khususnya yang berkaitan dengan item-item pelayanan yang sudah ditetapkan untuk menjadi tanggungan pemerintah berdasarkan data hasil penelitian sudah terealisasi dengan baik. Data hasil penelitian pada tabel 5 menunjukkan bahwa untuk program kesehatan gratis, 82 % respondent menyatakan tidak ada lagi biaya lain (pungutan) yang dibebankan kepada masyarakat pada saat melakukan pemeriksaan kesehatan maupun pengobatan. Untuk program pendidikan gratis, 91 % masyarakat menjawab tidak ada lagi pungutan lain di sekolah.

Terkait masih adanya responden yang menjawab masih adanya pungutan, berdasarkan wawancara pada saat penelitian diperoleh informasi bahwa informan tersebut merupakan warga pendatang yang tidak terakomodir atau terdaftar sebagai peserta Jamkesda. Hal ini juga ditemukan pada program pendidikan gratis, dimana terdapat siswa pindahan yang belum terdaftar.

B. Efektivitas Pelayanan Kebijakan Program Kesehatan dan Pendidikan Gratis

Efektivitas dari pelaksanaan kebijakan program kesehatan dan pendidikan gratis di Kabupaten Halmahera Selatan bisa diamati dari bagaimana program tersebut terealisasi dengan baik dan memenuhi harapan masyarakat maupun lembaga pelaksana program di tingkat bawah yang langsung

bersinggungan dengan masyarakat seperti Rumah Sakit Umum maupun Pusat Kesehatan Masyarakat (PKM), untuk program kesehatan gratis serta lembaga pendidikan seperti Sekolah-Sekolah untuk program pendidikan gratis.

Tabel 6. Respon Pelaksana Program tentang Pembiayaan

Program	Belum Memenuhi	Sudah Memenuhi
Kesehatan Gratis	81%	19%
Pendidikan Gratis	85,7 %	14,3 %

Sumber : Data primer, 2017

Berdasarkan hasil penelitian kepada para pelaku atau pelaksana program di tingkat bawah tentang pembiayaan pada program kesehatan dan pendidikan gratis sebagaimana yang terdapat pada tabel 6. Data hasil penelitian menunjukkan bahwa sebanyak 81 % responden menyatakan realisasi program kesehatan gratis yang mekanismenya dengan pembiayaan beberapa item pelayanan dasar kesehatan bagi masyarakat ternyata belum dapat memenuhi kebutuhan operasional pelayanan pada tingkat bawah.

Sebanyak 85,7% responden menyatakan pelaksanaan program pendidikan gratis yang dilakukan dengan sistem subsidi belum dapat memenuhi kebutuhan operasional sekolah sebagai lembaga teknis pelaksana program. Dari hasil penelitian di lapangan juga diperoleh informasi bahwa pembiayaan belum menyentuh pada pengembangan fasilitas baik itu fasilitas kesehatan maupun fasilitas pendidikan.

Tabel. 7. Item Pembiayaan yang Belum Terpenuhi Untuk Operasional Program Pelayanan Kesehatan

Fasilitas Operasional	Persentase
Alat-alat Penunjang Kesehatan	41 %
Fasilitas Laboratorium	18 %
Obat-obatan	19 %
Kesejahteraan Tenaga Medis	3 %

Sumber : Data primer, 2017

Berdasarkan hasil penelitian pada tabel 7, diketahui masih terdapat item-item pendukung operasional untuk kegiatan pelayanan kesehatan yang menurut para responden belum dapat terpenuhi melalui pembiayaan program

C. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Program

Dalam pelaksanaan sebuah kebijakan tentunya juga dipengaruhi oleh berbagai faktor, begitupun dengan pelaksanaan kebijakan kesehatan dan pendidikan gratis di Kabupaten Halmahera Selatan. Dari hasil penelitian dapat dijelaskan faktor-faktor pendukung dan faktor-faktor yang menjadi kendala yang dihadapi pemerintah daerah kabupaten halmahera selatan dalam mengimplemantasikan program kesehatan dan pendidikan gratis sebagai berikut:

a) Faktor Pendukung

Meningkatnya angka partisipasi dan kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan dan pendidikan merupakan faktor yang mendukung jalannya kebijakan pelayanan kesehatan dan pendidikan gratis di Kabupaten Halmahera Selatan. Salah satu contoh pada data yang diperoleh untuk pelayanan kesehatan pada tahun 2010 dan 2011 angka peserta Jamkesda yang terlayani pada puskesmas yang berada dikabupaten halmahera selatan mencapai angka 118.602 Pasien, berbanding jauh dari peserta Askes dan Jamkesmas yang masing masing hanya 1905 pasien dan 845 pasien. Ini dipengaruhi oleh tingginya partisipasi masyarakat untuk

Jamkesda. Hal ini tentu saja bisa dimaklumi karena Kabupaten Halmahera Selatan merupakan salah satu daerah otonomi baru yang anggaran daerahnya masih sangat terbatas.

memperoleh pelayanan kesehatan yang menggunakan Jamkesda.

Pada sektor pendidikan sebagaimana yang sudah dipaparkan pada tabel 3 juga terlihat tingginya angka partisipasi sekolah pada anak-anak usia sekolah (SD, SMP, dan SMA). Tingginya angka partisipasi sekolah ini mengindikasikan adanya kesadaran warga masyarakat tentang pentingnya pendidikan bagi generasi penerus bangsa serta keberhasilan dari kebijakan pendidikan gratis dari pemerintah daerah.

b) Faktor Penghambat

1. Terbatasnya Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia merupakan salah satu faktor penting dalam proses implementasi suatu program atau kebijakan, dimana tanpa adanya dukungan dari sumber daya manusia yang memadai, baik itu berupa jumlah maupun kemampuan ataupun keahlian implementor.

Ketersediaan Sumber daya Manusia (SDM) organisasi (dinas daerah) sangat penting dalam implementasi kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah. SDM dimaksud antara lain mencakup karyawan yang harus mempunyai keahlian dan kemampuan melaksanakan tugas, perintah, dan anjuran atasan (pimpinan). Di samping itu, harus ada ketepatan dan kelayakan

antara jumlah karyawan yang dibutuhkan dan keahlian yang dimiliki sesuai dengan bidang tugas yang akan dikerjakan (Salusu, 1988).

Pada kenyataannya kondisi tenaga kesehatan yang ada di Kabupaten Halmahera Selatan masih jauh dari apa yang diharapkan. Di beberapa fasilitas kesehatan misalnya di Puskesmas, Pustu dan Polindes Tenaga Kesehatan masih sangat minim.

Hal yang sama juga menjadi kendala pada pelayanan di bidang pendidikan. Jumlah guru yang terbatas serta persebarannya yang tidak merata sehingga banyak sekolah yang kekurangan guru. Kondisi geografis juga sangat berpengaruh karena dengan karakteristik daerah kepulauan menyebabkan terbatasnya akses transportasi untuk mencapai daerah-daerah terpencil.

2. Sarana dan Prasarana

Ketersediaan sumber daya manusia juga perlu didukung oleh ketersediaan

D. Keberlanjutan Kebijakan Program Kesehatan dan Pendidikan Gratis

Kebijakan program kesehatan dan pendidikan gratis oleh pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan pada kurun waktu tahun 2008 sampai 2014 dianggap oleh banyak kalangan sebagai sebuah langkah berani. Meskipun termasuk dalam kategori daerah otonomi baru yang masih memerlukan banyak dana untuk pembangunan di sektor-sektor lain, namun sektor kesehatan dan pendidikan

fasilitas yang dibutuhkan dalam pelaksanaan program dimaksud. Kondisi sarana dan prasarana pada fasilitas kesehatan dan pendidikan yang ada di kabupaten Halmahera Selatan seperti Puskesmas Pustu, Polindes dan Sekolah yang memadai masih terkonsentrasi pada daerah-daerah seputaran Ibu Kota Kabupaten. Sedangkan untuk daerah-daerah yang jauh dari pusat kota kabupaten kondisinya masih perlu untuk ditingkatkan.

Sarana dan prasarana di beberapa fasilitas kesehatan sesuai fakta di lapangan belum terlalu memadai. Terdapat beberapa kekurangan yang didapatkan di beberapa desa terkait keberadaan Sumber Daya Manusia dan fasilitas kesehatan. Maka dari itu, peneliti menganggap belum terpenuhinya Sumber Daya Manusia dan fasilitas kesehatan dan pendidikan sebagai faktor penghambat dalam memperoleh suatu layanan kesehatan yang baik dan menyeluruh.

merupakan kebutuhan mendesak masyarakat yang harus dilayani oleh pemerintah daerah saat itu. Dari hasil penelitian diperoleh informasi bahwa masyarakat di Kabupaten Halmahera Selatan menyatakan kebijakan ini sangat bermanfaat dan mereka sangat berharap agar program ini masih tetap dilanjutkan.

Tabel.8. Harapan Masyarakat terhadap Keberlanjutan Program

Program	Keberlanjutan Program	
	Perlu	Tidak Perlu
Kesehatan Gratis	97 %	3 %
Pendidikan Gratis	90 %	10 %

Sumber : Data primer, 2017

Manfaat yang dirasakan masyarakat dari program kesehatan dan pendidikan gratis ini sangat besar. Ini bisa terlihat pada data hasil penelitian pada tabel 8 di atas. Diketahui sebanyak 97 % responden yang diteliti memberikan jawaban sangat menginginkan agar program kesehatan gratis tetap dilanjutkan. Begitu juga dengan harapan dari masyarakat untuk program pendidikan gratis. Sebanyak 90

% responden menginginkan program ini tetap dilanjutkan.

Walaupun saat ini program serupa juga sudah menjadi program Nasional yaitu melalui Kartu Indonesia Sehat dan Kartu Indonesia Pintar namun secara umum masyarakat di Kabupaten Halmahera Selatan sangat menginginkan agar program ini tetap berlanjut.

Tabel 9. Tanggapan Masyarakat tentang Manfaat Program

Program	Manfaat Program	
	Sangat Bermanfaat	Tidak Bermanfaat
Kesehatan Gratis	98 %	2%
Pendidikan Gratis	93 %	7 %

Sumber : Data primer, 2017

Dilihat dari segi manfaatnya, program kesehatan dan pendidikan gratis pada kenyataannya sangat bermanfaat bagi masyarakat. Berdasarkan data hasil penelitian pada tabel 9, terdapat 98% responden menyatakan bahwa program kesehatan gratis (Jamkesda) sangat bermanfaat bagi masyarakat.

Dari informasi yang diperoleh di lapangan, banyak warga yang memberikan pernyataan merasa terbantu sekali dengan adanya program kesehatan gratis ini. Mereka juga berharap agar selain pelayanan pengobatan, fasilitas kesehatan seperti

puskesmas rawat inap dan fasilitas laboratorium juga perlu ditingkatkan.

Untuk program pendidikan gratis, data pada tabel 9 juga menunjukkan tingginya persentase responden yang merasakan manfaat dari program tersebut yaitu sebanyak 93 %. Dengan adanya program pendidikan gratis ini, masyarakat khususnya yang kurang mampu dapat menikmati pendidikan dasar.

KESIMPULAN

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa

implementaasi pelaksanaan kebijakan program kesehatan dan pendidikan gratis oleh pemerintah daerah Kabupaten Halmahera Selatan dalam kurun waktu tahun 2008 sampai dengan 2014 sudah tepat sasaran dan sangat bermanfaat bagi masyarakat. Meskipun dari segi pembiyaan menurut para pelaksana program di tingkat bawah belum dapat memenuhi item-item pendukung operasional program, tetapi kebijakan ini merupakan sebuah terobosan pemerintah daerah sebagai bentuk pelayanan terhadap hak-hak dasar masyarakat.

SARAN

Peneliti menyarankan agar program ini dapat berlanjut guna mendukung pelaksanaan program Nasional (Kartu Indonesia Sehat dan Kartu Indonesia Pintar). Mekanisme pembiyaan pada program kesehatan dan pendidikan gratis yang sebelumnya diarahkan pada pelayanan dasar dapat dialihkan pada peningkatan fasilitas sarana dan prasarana kesehtaan dan pendidikan serta pengembangan kapasitas pelayanan terutama untuk sumber daya manusia.

DAFTAR PUSTAKA

- Budiman Rusli. 2004, *Pelayanan Publik di Era Reformasi*. Jakarta
- EGC Mcmatian Rosemary,dkk, 1999. *Manajemen Pelayanan Kesehatan Prima*. Penerbit Buku Kedokteran EGC.Jakarta
- Mahfud, MD. 2000. *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia: Studi Tentang Interaksi Politik dan Kehidupan Ketatanegaraan*. Jakarta: Rineka Cipta
- Osborne, David dan Peter Plastrik (2000), *Memangkas Birokrasi: Lima strategi menuju Pemerintahan Wira Usaha*, Edisi Terjemahan. Penerbit PPM, Jakarta.
- Siagian, Sondang P. 2000. *Teori Pengembangan Organisasi*. Jakarta : Penerbit Bumi Aksara.
- Syaukani, Affan Gaffar, Ryass Rasyid. 2002. *Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Tangkilisan, Hesel Nogi S. Drs. M.Si. 2005. *Manajemen Publik*. Jakrta : PT. Gra